

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA BATAM

Novi Wahyuningsih^{1)*}, Karol Teovani Lodan²⁾, Timbul Dompok³⁾, Lubna Salsabila⁴⁾
(e-mail: noviwhyns@gmail.com¹, karol@puterabatam.ac.id², Timbul.Dompok@puterabatam.ac.id³,
lubna.salsabila@puterabatam.ac.id⁴)

(*) Corresponding Author

1), 2), 3), 4) Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

ABSTRACT

As a government that has a very strategic authority and position related to its obligations as a "public service" to improve the welfare, prosperity, security and peace of society, regional governments have a very important role in regional development planning. Regional governments in this case must carry out their main tasks which of course must be adjusted to the vision, mission, goals and objectives that will be achieved later. Development is a complex process that requires significant changes in social structures, cultural values, and institutional frameworks to promote faster economic growth, reduce income disparities, and eradicate poverty. Apart from roads, trucks, cable cars and trains, roads are all road elements protected by land transportation infrastructure, including supporting buildings and traffic instruments that are above ground and above water. This scientific work was written using descriptive techniques. This approach can be described as a critical thinking methodology that involves reading articles or other items. In accordance with Law Number 23 of 2014, autonomous regional governments led by regional heads are organized by regional governments. One of the cities or districts in the Riau Islands Province that is still developing is Batam City. Regional governments are still concerned and monitoring infrastructure development. During the Covid-19 epidemic, environmental and meteorological conditions, obstacles and the process of road infrastructure development also occurred. However, considering the existing challenges and setbacks, this can be used as a basis for review and improvement in preparing for the next phase of regional government growth. Therefore, these difficulties do not become a challenge for local governments during the development process; instead, it can be taken into account later.

Keywords: Local Government; Development; Infrastructure

ABSTRAK

Sebagai pemerintah yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sangat strategis terkait dengan kewajibannya sebagai "pelayanan publik" untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus melaksanakan tugas pokoknya yang tentunya harus disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai nantinya. Pembangunan adalah proses rumit yang memerlukan perubahan signifikan dalam struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan kerangka kelembagaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan. Selain jalan raya, truk, kereta kabel, dan kereta api, jalan adalah seluruh elemen jalan yang dilindungi oleh prasarana transportasi darat, termasuk bangunan pendukung dan instrumen lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah dan di atas air. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan teknik deskriptif. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai metodologi berpikir kritis yang melibatkan membaca artikel atau item lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satu kota atau kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang masih terus berkembang adalah Kota Batam. Pemerintah daerah masih konsen dan memantau pembangunan infrastruktur. Selama epidemi Covid-19, keadaan lingkungan dan meteorologi, hambatan, dan proses pembangunan infrastruktur jalan juga terjadi. Namun, mengingat tantangan dan kemunduran yang ada, hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar peninjauan dan perbaikan dalam mempersiapkan fase pertumbuhan pemerintahan daerah selanjutnya. Oleh karena itu, kesulitan-kesulitan tersebut tidak menjadi tantangan bagi pemerintah daerah selama proses pembangunan; sebaliknya, hal tersebut dapat diperhitungkan nanti.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Pembangunan; Infrastruktur

I. PENDAHULUAN

Sebagai pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang sangat strategis terkait dengan tugasnya sebagai “pelayanan publik” untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dalam hal ini diawali dengan tahapan proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam suatu lingkungan atau kawasan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pemerintah daerah ikut serta dalam proses pelaksanaan yang telah dijadwalkan sebelumnya sebagai fasilitator dan penggerak. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menjalankan fungsi dan tugas pokoknya yang tentunya harus menyesuaikan dengan visi, misi, sasaran serta tujuan yang nantinya akan dicapai.

Menurut Soemendar (1985:1) dan Sayafiie (2011) dalam (Soares et al., 2015), pemerintah merupakan lembaga yang sangat penting dalam kerangka sistem pemerintahannya dan dengan demikian bertanggung jawab memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta memenuhi kebutuhan, aspirasi dan pendapat konstituennya serta faktor lingkungan, persyaratan peraturan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan legitimasi. Komponen penting dari tugas utama pemerintah daerah, yaitu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Soares et al., 2015).

Tuntutan tugas pokok dan fungsi itu sendiri menurut Ndraha (1987:110) dalam (Soares et al., 2015) dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat dan

pemerintah, sehingga cakupan keterlibatan pemerintah dalam pembangunan masyarakat meluas dari isu-isu yang murni bersifat operasional untuk penyediaan layanan operasional, spiritual dan ideologis. Menurut Rasyid (2000: 48) dalam (Soares et al., 2015) penyelenggaraan tanggung jawab utama yang diatur oleh undang-undang yang ditetapkan dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut membentuk dasar tata pemerintahan yang baik, hal tersebut bergantung pada pemimpin itu sendiri. Ada tiga tugas penting yang harus diselesaikan dalam situasi ini: pelayanan, pemberdayaan, dan pertumbuhan. Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa pelayanan yang baik akan menghasilkan keadilan bagi warga bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan mendorong kemandirian dan pertumbuhan daerah yang akan membawa pada keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat (Soares et al., 2015).

Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur serta membangun suatu daerah menjadi lebih baik. Pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan penyesuaian besar terhadap struktur sosial, norma budaya, dan kerangka kelembagaan sambil mengejar pembangunan ekonomi yang lebih cepat, mengatasi kesenjangan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan (Sunani et al., 2021). Pembangunan juga dapat dilihat sebagai proses perubahan sosial dengan melibatkan banyak pihak di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu kemajuan sosial.

Melihat pada realita yang ada, pemerintah telah melakukan perbaikan dan pembenahan pada pembangunan infrastruktur jalan di beberapa titik di Kota Batam. Jalan yang dahulu menjadi titik kemacetan dan dipadati dengan para pengendara, kini telah berbeda dengan sebelumnya. Meski pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya diselesaikan, dan sempat terhenti beberapa waktu, namun hal ini tidak menjadi masalah yang besar dan pembangunan terus berlanjut sembari tetap digunakan oleh para

pengendara meski sarana yang ada di jalan belum sepenuhnya memadai. Bahkan di titik lainnya pembangunan telah dikatakan selesai dan sudah dirasakan oleh masyarakat yang berkendara di jalan tersebut. Meski pembangunan infrastruktur jalan telah dilakukan untuk mengurangi kepadatan pengendara, namun dapat kita lihat bahwa terdapat kerusakan di beberapa titik jalan, seperti jalan berlubang yang sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Di satu sisi lampu jalan yang memudahkan pengendara melihat jalan dalam kegelapan juga kurang berfungsi dengan baik. Terdapat lampu yang redup, bahkan tidak berfungsi untuk menerangi jalan di malam hari. Hal ini tentu menjadi kendala dan membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan membenahi infrastruktur jalan yang ada.

Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam.

II. METODE

Adapun metode dalam penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini dapat dicirikan sebagai metodologi berpikir kritis yang mencakup memeriksa artikel atau item, dapat pula didefinisikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang melibatkan penyelidikan keadaan subjek atau objek (orang, institusi, komunitas, dll.) melalui deskripsi tertulis. Saat ini, bentuk-bentuk ini didasarkan pada fakta yang terlihat.

Metode deskriptif adalah cara untuk menyelidiki sekelompok individu, objek, sekelompok kondisi, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa, menurut Nazir (1988:63) dalam [Sandag, G., & Valensky, F. \(2015\)](#) pada buku yang berjudul "*The Sample Book of Research Methods*". Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menganalisis atau menggambarkan fakta, kualitas, dan korelasi dari fenomena

yang diselidiki atau dievaluasi secara metodis, jujur, dan akurat ([Sandag & Valensky, 2015](#)).

Dalam artikel ilmiah ini penulis menggunakan informasi opsional, informasi tambahan adalah data yang diperoleh dari artikel yang ada, buku-buku yang berhubungan dengan objek penilaian seperti hipotesis, disertai pedoman dan aturan, dan lain-lain.

III. PEMBAHASAN

Pembahasan ini Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di daerah yang dihibahkan oleh pemerintah pusat, kepala daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan.

Sebelum membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, perlu kita ketahui peran-peran pemerintah daerah yang lainnya, di antaranya:

Fungsi pemerintah daerah sebagai pengusaha adalah mendukung pengembangan usaha kecil melalui kebijakan dan industri. Strategi untuk usaha kecil melibatkan pemberian dukungan dan pelatihan kepada masing-masing perusahaan sehingga mereka dapat tumbuh. Pemerintah dapat membantu usaha yang kekurangan dana dengan menawarkan pembiayaan dan subsidi kepada pemilik usaha di daerah setempat.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mendukung semua penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kabupaten. Ini merupakan tugas pemerintah daerah sebagai koordinator jika dilihat dari tanggung jawab utama dan fungsi pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pemantauan, terutama kebijakan pembangunan daerah pemerintah daerah Akibatnya, pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan pengetahuan untuk bertindak sebagai koordinator untuk mengontrol semua pekerjaan dan kegiatan di daerah dan bagaimana meningkatkan proses pembangunan Kota Batam.

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003:6) dalam (Soares et al., 2015), perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memajukan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Harus memiliki orientasi yang komprehensif, lengkap, dengan tetap berpegang pada prinsip prioritas. Strategi pelibatan masyarakat populer yang dikenal sebagai "Perencanaan dari Bawah ke Atas" harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi prakarsa perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. Perencanaan ke lapisan masyarakat yang paling bawah, yang merupakan slogan dari negara yang demokratis, sangat terkait dengan keterlibatan masyarakat (Soares et al., 2015).

Fungsi pemerintah daerah sebagai stimulan dengan mengambil langkah-langkah khusus untuk menarik perusahaan baru ke daerah dan mempertahankan yang sudah beroperasi, pemerintah dapat berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi.

Dengan begitu, pemerintah melakukan upaya yang disengaja dan metodis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan, kadang-kadang dikenal sebagai "*development*". Tujuan pembangunan adalah untuk terus memperbaiki lingkungan agar setiap warga negara dapat mewujudkan cita-citanya yang paling manusiawi. Peningkatan kesejahteraan komunal sering direpresentasikan sebagai tujuan yang paling manusiawi (*society welfare*). Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur serta membangun suatu daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur di kota Batam.

Dalam situasi ini, Kepala Daerah berfungsi sebagai perangkat daerah sekaligus alat Pemerintah Pusat. Tugas aparaturnya adalah melaksanakan kewajiban dan hak pemerintah daerah, mewakili daerah dalam proses hukum dan forum lainnya, dan bekerja

sama dengan DPRD untuk menyusun anggaran pendapatan daerah atau peraturan daerah. Kepala Daerah yang berfungsi sebagai alat Pemerintah Pusat bertanggung jawab Memajukan ketenteraman dan ketertiban di daerah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, melaksanakan segala prakarsa dan tindakan yang dimaksudkan untuk memajukan persatuan bangsa, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaannya. pemerintah daerah, serta senantiasa bekerja untuk memastikan terlaksananya seluruh peraturan perundang-undangan.

Kota Batam merupakan salah satu kota atau kabupaten di provinsi Kepulauan Riau yang terus mengalami pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur terus dibenahi dan dievaluasi oleh pemerintah daerah.

Secara garis besar, masyarakat kota Batam khususnya masyarakat pada umumnya telah merasakan dampak yang baik dari pembangunan yang telah dilakukan, seperti contoh pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah daerah dinilai sebagai pembangunan yang sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan jalan memudahkan masyarakat dalam berkendara setiap harinya. Telah kita ketahui bahwa di kota Batam sendiri mayoritas masyarakatnya adalah para pekerja. Karena, di kota Batam sendiri tidak hanya masyarakat lokal yang berada di kota Batam, perantau dari berbagai daerah pun datang ke kota Batam untuk bekerja, hal ini tentu menambah jumlah masyarakat pengguna jalan di kota Batam. Jumlah masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan kemacetan tidak dapat dihindari, terutama pada jam-jam masyarakat mulai berangkat menuju tempat kerja mereka, dan di saat jam pulang masyarakat dari tempat kerja mereka.

Melihat permasalahan yang terjadi, pemerintah daerah melakukan pembenahan

pada infrastruktur jalan yang menjadi titik kemacetan dan padat kendaraan. Pemerintah daerah memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur jalan guna menunjang ekonomi, dan melancarkan segala aktivitas masyarakat.

Dalam pengerjaan serta proses pembangunan tentu mengalami kendala dan hambatan. Mengingat jalan yang diperbaiki adalah jalan utama dalam berkendara setiap harinya. Banyaknya pengendara yang melewati jalan tersebut membuat para pekerja konstruksi yang membangun jalan menjadi lebih hati-hati dan terbatas dalam melakukan setiap proses. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya masalah kemacetan yang baru untuk sementara waktu. Apabila musim hujan telah tiba, jalanan menjadi becek dan licin karena genangan air yang bercampur dengan tanah dari sisa-sisa galian pada saat pembangunan berlangsung. Selain faktor kondisi lingkungan serta cuaca, faktor penghambat, proses pembangunan infrastruktur jalan juga terjadi pada masa pandemi Covid-19. Meski pandemi sedang berlangsung pada saat proses pembangunan, namun pembangunan tetap dilanjutkan. Seperti pelebaran dan penataan sejumlah jalan kota di tengah pandemi Covid-19, yaitu Simpang Basecamp, Simpang Tembesi dan Simpang Fanindo. Bapak Muhammad Rudi selaku Walikota Batam mengatakan bahwa, *“pelaksanaannya berjalan lancar dan akan selesai tepat waktu”*. Penataan simpang tersebut akan berkelanjutan hingga tiga tahun.

Hambatan dapat berupa halangan atau rintangan, hal ini tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setiap kegiatan atau pekerjaan memiliki arti yang sangat vital bagi hambatan. Jika ada penghalang yang menghalangi pekerjaan, tugas atau proyek tidak akan selesai. Hambatan adalah situasi yang mungkin mencegah implementasi berjalan sesuai rencana. Setiap orang memiliki tantangan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu datang dari dalam diri seseorang atau dari luar.

Namun dengan adanya hambatan dan rintangan yang telah terjadi, dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan pada perencanaan proses pembangunan pemerintahan daerah yang selanjutnya. Oleh karena itu, hambatan atau rintangan tidak menjadi halangan bagi pemerintah daerah dalam proses pembangunan, justru dapat menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa Kota Batam merupakan salah satu kota atau kabupaten di provinsi Kepulauan Riau yang terus mengalami pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur terus dibenahi dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur serta membangun suatu daerah menjadi lebih baik. Pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan penyesuaian besar terhadap struktur sosial, norma budaya, dan kerangka kelembagaan sambil mengejar pembangunan ekonomi yang lebih cepat, mengatasi kesenjangan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah telah melakukan perbaikan dan pembenahan pada pembangunan infrastruktur jalan di beberapa titik di Kota Batam. Jalan yang dahulu menjadi titik kemacetan dan dipadati dengan para pengendara, kini telah berbeda dengan sebelumnya. Meski pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya diselesaikan, dan sempat terhenti beberapa waktu, namun hal ini tidak menjadi masalah yang besar dan pembangunan terus berlanjut sembari tetap digunakan oleh para pengendara meski sarana yang ada di jalan belum sepenuhnya memadai. Dalam situasi ini, Kepala Daerah berfungsi sebagai alat Pemerintah Pusat sekaligus sebagai perangkat daerah.

Tugas aparatur daerah adalah melaksanakan kewajiban dan hak pemerintah

daerah, mewakili daerah dalam proses hukum dan forum lainnya, serta bekerja sama dengan DPRD untuk menyusun anggaran pendapatan daerah atau peraturan daerah. Kepala Daerah yang berfungsi sebagai alat Pemerintah Pusat bertugas membina persatuan bangsa, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, serta mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka juga bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian dan ketertiban di daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta senantiasa bekerja untuk memastikan terlaksananya seluruh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-93.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883-902.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam konsep Desa dan kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 40847.
- Nugroho, S. (2013). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan pelayanan publik. *Cita Hukum*, 1 No.2(September 2013), 248-262.
- Sandag, G., & Valensky, F. (2015). Analisis Semiotik Koleksi Foto Jurnalistik Dalam Artikel 2014: the Year in Photos. *Jurnal Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 4(2), 1-14.
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689-1699.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42401.am Perencanaan Pembangunan Dae. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42401.
- Sunani, U., Sosial, F. I., Al, U., & Mandar, A. (2021). Perguruan: Conference Series. 3(September).
- Zulfahri, Z. (2017). Evaluasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus: Kecamatan Uluere dan Kecamatan Sinoa) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).